MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 657/DJMT.1/ST.KP7.1/VIII/2026

Menimbang : Bahwa untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisiàn data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP melalui aplikasi Monitoring Aplikasi SIPP (MIS) sesuai dengan Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sinkroniasi Data MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dengan server di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan pembahasan melalui kegiatan kelompok kerja.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 66/DJMT/SK.OT1 .2/VII/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Petunjuk Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H./ 197811042007041001, Pembina Tingkat I (IV/b), Hakim Yustisial;
2. Jefri Ardianto, S.T., M.M./ 197704142009041005, Pembina (IV/a), Kabag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat;
3. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M./ 198408112009041003, Pembina (IV/a), Kasi Bimbingan dan Monitoring Ditbinganismintun;
4. Alvin Bagus Setyawan, S.T./ 198812302020121006, Penata Muda Tingkat I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama;
5. Theo Afianto, S.T./ 199612112020121005, Penata Muda Tingkat I (III/b), Pranata Komputer Ahli Pertama.

Untuk : Mengikuti kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Petunjuk Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Hotel The Grand Platinum Jakarta, Jalan Kartini Raya, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2026;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.